

GOLPUT DAN PEMILU 2024

Maringan Panjaitan¹ Jonson Rajagukguk² Grace Y Damanik³ Elfrida Aruan⁴ Rahmat Syukur Gulo⁵

¹² Dosen Prodi Adm Publik Fisipol UHN Medan

³⁴⁵ Mahasiswa Prodi Adm Publik Fisipol UHN Medan

maringanpanjaitan@uhn.ac.id

Asbtrak: *Pemilihan umum adalah sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan inilah satu-satunya proses untuk membangun adab politik sebuah negara. Dalam pemilu warga negara diberikan kebebasan sebeb-asasnya dan dijamin oleh konstitusi untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Melalui pemilu warga negara akan datang ke tempat pemungutan suara dan sudah di atur oleh negara melalui regulasi khusus tentang pemilihan umum. Warga negara akan mmeberikan hak politiknya agar kedepan tercipta struktur pemerintahan yang akan menyelenggarakan tata kelola negara untuk pelayanan publik dan percepatan pembangunan. Masalahnya, apakah sebuah pemilu sah bila partisipasi warga negara ini minim atau jauh dari yang kita harapkan? Seperti istilah golongan putih (golput) dimana warga negara sangat pasif dan tidak memberikan hak politiknya. Kita akan memasuki tahun politik dan pemilu 2024 semkain dekat. Apakah angka golput bisa tinggi dan bisa berkurang? Ini tentu sebuah pertanyaan yang sangat relevan agar legalitas pemilu bisa lebih baik karena setipa pemilu partisipasi politik warga negara adalah faktor pendukung keberhasilan pemilu.*

Kata kunci: partisipasi politik, golput, dan pemilihan umum

Abstract: *General elections are a means of upholding people's justice and this is the only process to build a country's political ethics. In elections, citizens are given as much freedom as possible and guaranteed by the constitution to express their political aspirations. Through elections, citizens will come to the polls and have been regulated by the state through special regulations regarding general elections. Citizens will give their political rights so that in the future a government structure will be created that will organize state governance for public services and accelerate development. The problem is, is an election valid if the citizen's participation is minimal or far from what we expect? Like the term white group (abstentions) where citizens are very passive and do not give their political rights. We will enter the political year and the 2024 elections are getting closer. Can the abstentions increase or decrease? This is certainly a very relevant question so that the legality of elections can be better because every citizen's political election participation is a supporting factor for the success of elections.*

Keywords: political participation, golput, and general elections

Latar Belakang

Keberhasilan sebuah negara dalam membangun dan melembagakan politiknya sangat tergantung sejauh mana partisipasi politik warganya dalam politik. Pemilu yang diselenggarakan oleh sebuah negara dengan jaminan UU dan jaminan konstitusional adalah sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu rakyat memberikan hak politiknya dan partisipasinya untuk menentukan amsa depan pemerintahan lima tahun kedepan.

Jika kita lihat sebuah kasus di Kota Medan pada beberapa waktu yang silam mislanya bahwa golput bisa jadi sebuah pilihan politik yang bisa jadi masalah kedepannya karena menganggap legalitas pemilu kedepan. Rendahnya partisipasi politik masyarakat (*political participant society*) dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di Kota Medan beberapa tahun yang lalu mislanya sebagai sebuah kasus masalah golput dari berbagai kasus lainnya. Pilkada sebagai proses politik (*political process*) dalam mencari figur Kepala Daerah yang merakyat kembali

diperhadapkan dengan golput yang terus menerus keluar sebagai pemenang (*the winner player*). Partisipasi pemilih berkisar 20 s/d 30 persen saja. Artinya angka golput sudah pasti sampai pada angka 70 persen lebih. Persentase itu naik dibandingkan partisipasi pemilih pada Pemilu Gubernur Sumut tahun 2013 yakni sebesar 43% atau 625.067 pemilih dari 1.433.551 pemilih terdaftar. Sedangkan partisipasi pemilih pada Pemilu Kota Medan hanya sampai kisaran 20 s/d 30 persen.

Mengapa golput sering (terus) menang dalam setiap event pilkada? Bahkan golput menang dalam pilkada Kota Medan? Apakah golput sebagai sikap politik (*political principle*) rakyat yang kritis patut dijadikan sebagai ancaman demokrasi? Di negara-negara maju fenomena golput bukan sesuatu hal yang menakutkan. Persentase golput di negara –negara maju sangatlah kecil. Tradisi masyarakat negara maju memilih sangat tinggi. Mereka berduyun –duyun akan terjun ke TPS jika sudah waktunya pemilu (apakah eksekutif dan legislatif). Tradisi fanatisme pemilih muncul di negara maju karena memang pilihan mereka sangat menentukan nasib mereka.

Bagaimana dengan kondisi negara kita dimana tiap tahun tradisi memilih pemimpin dalam setiap pilkada cenderung mengalami penurunan (golput). Pertanyaannya, mengapa masyarakat lebih (cenderung) memilih golput sebagai sikap politik? Padahal masa depan mereka lima tahun sangat ditentukan oleh kualitas pemimpin di daerahnya. Sikap apatisme masyarakat ini harus dijadikan sebagai ancaman demokrasi.

Jangan kita samakan golput di negara maju sebagai sikap politik dengan golput di negara yang sedang dalam transisi demokrasi. Konteks golput di negara maju sangat beda dengan negara kita. Golput di negara maju merupakan rasionalitas politik. Mungkin dia melihat si calon tidak layak, dan tidak terjadi secara kolektif, hanya personal.

Di negara kita golput terjadi secara kolektif (bersama), bukan personal. Fenomenanya sama dengan (satu) alasan yang sama. Alasan masyarakat menjadi golput kalau diambil semua jawaban bisa dipastikan 90 persen jawabnya sama, yaitu siapapun yang terpilih jadi pemimpin tetap akan korupsi. Siapun pemimpin nasib kita tetap seperti ini –ini saja. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa muncul tulisan ini.

I. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

- 1) Memberikan pemahaman tentang golput sebagai fenomena politik kepada publik bisa tahu mana pilihan politik yang lebih baik dengan segala risikonya.
- 2) Memberikan solusi dalam membangun sistem tata kelola pemilu berbasis partisipasi publik.
- 3) Membangun sistem pemilu yang bisa mengakomodir berbagai aspirasi yang bagus untuk pemilu 2024 ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode deskriptif analisis dimana penulis memaparkan secara jelas fokus masalah dengan cara kualitatif sehingga apa yang menjadi permasalahan bisa dipahami dengan baik setelah memperoleh gambaran yang jelas dengan teori –teori dan fakta yang ada di lapangan. Definisi penelitian kualitatif dapat ditemukan pada banyak literatur. Antara lain, Ali dan Yusof (2011) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai: Any investigation which does not make use of statistical procedures is called “qualitative” nowadays, as if this were a quality label in itself. Definisi dari Ali dan Yusof tersebut, menekankan pada ketidakhadiran penggunaan alat-alat statistik dalam penelitian kualitatif. Hal ini tentunya untuk mempermudah dalam membedakan penggunaan metode kualitatif dengan penggunaan metode kuantitatif. Karena metode kuantitatif bergantung pada penggunaan perhitungan dan prosedur analisis statistika.

Sementara itu, metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri (2014) menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Mohamed, Abdul Majid & Ahmad, 2010).

Metodologi penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memberikan gambaran dan masukan mengenai fenomena golput sebagai partisipasi politik yang statis di pemilu 2024. Dengan demikian akan ada gambaran bahwa golput adalah sebuah masalah dan bisa dicarikan solusinya sebagai sebuah fenomena politik yang lama dan kalau bisa dihindari untuk pemilu 2024.

PEMBAHASAN

Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

Adapun yang menjadi Tujuan Pemilu Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni: 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy). 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sedangkan yang menjadi fungsi Fungsi Pemilihan Umum Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk : 1) Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia. 2) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). 3) Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

Memang kita akui ketika masyarakat memilih kepala daerah (Gubernur/Walikota dan Bupati) secara langsung yang dimulai dari tahun 2004 yang lalu harapan masyarakat adanya perubahan secara radikal. Konsep pembangunan kearifan lokal yang digadag-gadag akan mampu memperbaiki nasib mereka tidak kunjung datang. Bahkan desentralisasi korupsi makin merajalela. Bupati dan Walikota yang terpilih bukan fokus dalam mengurus rakyatnya sebagaimana yang diamantakn oleh UU. Bahkan pada pemilukada selanjutnya yang dimulai tahun 2008/2009 fenomena yang sama. Aktivitas pemerintah begitu-begitu saja. Tidak ada terobosan yang berarti yang bisa mengangkat derajat hidup masyarakat daerah. Kecenderungan korupsi tetap terjadi.

Apa yang diharapkan oleh masyarakat pada Bupati dan Walikota dalam bentuk perbaikan infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Dimana-mana jalan hancur lebur, kualitas air minum tidak bagus, biaya sekolah mahal sekalipun anggaran pendidikan sangat besar. Bahkan banyak lagi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat.

Tujuan otonomi daerah yang dirumuskan oleh pemerintah dalam rangka medekatakan pemerintahan kepada rakyat supaya percepatan pembangunan dan percepatan pelayanan publik dapat terwujud, gagal sama seklai. Banyak Pejabat dan Kepala Daerah yang ditangkap oleh KPK karena korupsi. Korupsi di daerah menjadi isu nasional. Tata kelola anggaran makin runyam karena cenderung disalahgunakan oleh pemda. Semua ini berefek pada tidak jalannya pemerintahan yang efektif dan efisien. Akhirnya, kualitas hidupa masyarakat tidak berubah.

Sementara biaya untuk mkelaksanakan pilkada sangatlah besar. Anggaran untuk pilkada per Kabupaten mencapai rata-rata 18 miliar untuk satu putaran. Anggaran yang besar ini dianggap mubazir kalau hanya untuk melahirkan Bupati dan Walikota yang korup. Akibatnya wacana model pemilihan kepala daerah secara langsung pun perlu ditinjau ulang. Proses demokratisasi yang diharapkan melalui pilkada tidak berjalan sesuai dengan skenario. Siapa yang patut dipersalahkan dengan carut marutnya pilkada kita sekarang ini?

Secara sistem, model pilkada secara lsung sudahlah tepat. Implementasinya yang jauh dari ontologi pilkada langsung ini. Pilkada langsung tanpa diimbangi dengan persiapan yang matang, persiapan SDM telah membuat masyarakat alergi dengan pilkada. Mengapa tidak, semua calon menjanjikan perubahan yang radikal untuk perbaikan hidup masyarakat. Setelah terpilih apa yang dijanjikan tidak juga terealisasi. Bahkan dalam setiap event pilkada sering terjadi konflik sosial, semua calon yang kalah rame-rame menggugat ke Mahkamah

Konstitusi, akibatnya pendidikan politik yang memberikan kesadaran kepada masyarakat nihil sama sekali.

Inilah yang memicu sikap masyarakat untuk golput dan merupakan sikap politik. Apakah masyarakat patut dipersalahkan dengan pilihan politiknya ini? Tentu tidak. Sekalipun peran civil society merupakan prasyarat mutlak dalam konsolidasi demokrasi modern sebagaimana yang dikatakan oleh Juan J Linz dan Alfred Sthepan (1996), masyarakat tidak bisa langsung dipersalahkan.

Ini adalah hubungan sebab akibat (kausalitas). Ketika pemerintah menyatakan dirinya sebagai pemerintahan yang merakyat, nyatanya pemerintahan yang culas masyarakat akan melihat ini sebagai kebohongan besar. Akibatnya masyarakat hanya melihat pemerintahan ini adalah bentuk oligarki elite semata. Pemerintah hanya milik sekelompok orang yang punya akses mengendalikan pemerintahan. Akses masyarakat miskin sangat lemah kepada pemerintah daerah karena bargaining posisionnya sangat rendah. Akibatnya, masyarakat kita menjadi masyarakat yang sangat apatis kepada pemerintahan.

Pemerintahan daerah yang miskin kreasi, tetapi subur korupsi memicu masyarakat makin apatis. Ketika muncul pilkada, padahal menentukan nasib masyarakat itu sendiri, masyarakat lebih memilih golput dengan satu alasan, pilkada tidak akan mengubah nasib mereka. Pola pikir seperti ini harus dilihat pemerintah sebagai ancaman. Pemerintah pusat perlu melakukan kebijakan.

Misalnya, siapa kepala daerah terpilih harus menjalankan pemerintahannya secara terukur. Pemerintah pusat perlu membuat beberapa indikator capaian pemerintahan yang sukses. Semua kepala daerah perlu mencapaian indikator ini yang muaranya adalah percepatan dan peningkatan kualitas layanan publik. Dengan demikian semua pemda akan berusaha maksimal untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan baik karena adanya target capaian yang dibuat oleh pemerintahan pusat.

Pemerintah pusat harus mampu mengambil hati masyarakat dengan terus mendorong pemerintah daerah adalah pemerintahan yang melayani dengan baik. Dengan demikian masyarakat akan berubah dan mengatakan betapa pemerintahan itu sangat penting dalam proses pembangunan daerah. Yang ada di pikiran masyarakat kita saat ini adalah bahwa pemerintahan itu hanya milik beberapa orang saja. Praktiknya memang seperti itu. Akibatnya memicu apatisme masyarakat kepada setiap aktivitas politik pemerintahan, termasuk pilkada.

Pilkada Kota Medan yang hanya menempatkan partisipasi masyarakat 20 persen s/d 30 persen memberikan kita sebuah pesan khusus, golput kedepannya akan semakin kuat dan melembaga. Apa upaya yang bisa dilakukan mencegah golput ini tidak bisa lagi dengan himbuan semata (iklan, alat peraga, dsb). Perlu sebuah terobosan yang brilian dengan cara meningkatkan kinerja pemerintahan menjadi pemerintahan yang merakyat, melayani dan visioner. Hanya dengan cara inilah angkat golput bisa dikurangi. Karena kepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah sudah hilang atau tidak percaya lagi. Siapapun walikota pasti semua urusan musti dengan uang atau tetap juga dengan uang.

Untuk itu, action adalah hal yang utama. Bagaimana pemerintah daerah, pemerintah pusat menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat yang sesungguhnya adalah esensi yang harus dilakukan kalau ingin melihat golput bukan lagi sebagai sikap politik dan pemenang. Kata kuncinya (political willnya) ada sama pemerintah. Dan untuk itulah Pemko Medan dengan Walikota yang baru harus bekerja ekstra keras untuk itu.

Fenomena golput yang menjadi pemenang pada pilgubsu 7 Maret 2013 menjadi bahan yang terus menjadi fokus diskusi di Sumatera Utara. Para analis politik di Sumatera Utara melalui Opini Harian SINDO Sumut terus mengupas mengapa golput bisa menjadi pemenang pada pilgubsu 2013. Terkejutkah kita golput bisa menang pada pilgubsu 2013? Setidaknya pertanyaan yang sangat sederhana ini mengawali tulisan ini mengapa golput bisa menang pada pilgubsu 2013. Bagi penulis secara pribadi munculnya golput sebagai pemenang bukan hal yang asing. Pada pemilihan Walikota Medan 2010 pun golput keluar sebagai pemenang. Memang tidak sebesar sekarang (pilgubsu 2013) persentasenya.

Golput sudah sering menjadi pemenang dalam setiap pelaksanaan pilkada di berbagai daerah. Kemenangan golput bukan hal yang asing lagi dalam demokrasi kita. Tentu yang menjadi pembahasan adalah sejauh mana golput mempengaruhi kualitas demokrasi yang sedang kita bangun bersama? Sementara fakta mengatakan pola partisipatoris warga dalam pembangunan bangsa sangat signifikan. Di negara-negara maju seperti Eropa barat, Jepang, Korea Selatan dukungan warga sangat signifikan bagi kemajuan negaranya. Asumsinya, semakin terdidik masyarakat semakin kuat kontrol pada penyelenggara negara.

Pada akhirnya elit-elit politik tidak bisa main-main lagi. Mereka ikut memperbaharui dirinya dan melakukan instropkesi karena kemajuan masyarakat tersebut. Dari sini dapat kita lihat tingkat pendidikan masyarakat yang bergerak maju ikut mempengaruhi kemajuan sebuah bangsa. Artinya, pemimpin yang merakyat lahir dari proses yang baik dan benar. Pada saat pemilihan langsung adalah sebuah pilihan yang dihadapkan pada masyarakat, apakah metode yang dianggap demokratis ini langsung menghasilkan seorang pemimpin yang baik, khususnya Gubernur dan Bupati beserta wakilnya?

Fakta mengatakan, evaluasi dari berbagai lembaga riset menunjukkan bahwa otonomi daerah cenderung gagal. Terlepas faktor yang mempengaruhinya. Otonomi daerah yang dulunya diharapkan mampu menjawab persoalan daerah dalam bentuk percepatan pembangunan, pendekatan pemerintahan kepada rakyat tidak sesuai dengan harapan rakyat. Bahkan yang paling menonjol adalah desentralisasi korupsi. Ada 174 kepala daerah berdasarkan data 2012 yang sedang dalam proses hukum. Ini merupakan sebuah gambaran bahwa otonomi daerah cenderung mengalami kegagalan. Menyelematkan otonomi daerah mutlak diperlukan pemimpin yang mampu memberikan pelayanan yang baik pada rakyat dengan komitmen dan integritas yang tinggi.

Berangkat dari kegagalan otonomi daerah dan aji mumpung kepala daerah maka muncullah apatisisme yang tinggi dikalangan rakyat. Pemerintah dimata rakyat adalah sekelompok oligarki lokal yang hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan masyarakat sampai beranggapan tanpa pemerintahan aktivitas rakyat tetaplah jalan.

Ini adalah sebuah kondisi yang tidak bagus di tingkat lokal. Bagaimana mengatasi ini dibutuhkan pemimpin di tingkat lokal yang transformatif dan aspiratif.

Dalam konteks Sumatera Utara, apakah kepemimpinan transformatif dan aspiratif terhadap kepentingan rakyat sudah terwujud dengan baik? Indikator kesana pun belum ada. Survei beberapa lembaga independen, bahkan KPK pada tahun 2011 pernah menempatkan daerah ini daerah paling korup. Pejabat di Sumatera Utara pun banyak yang berurusan dengan Jaksa, KPK karena terlibat persoalan korupsi. Tampilan SUMUT dengan sebutan semua urusan musti dengan uang tunai menjadi benar dalam konteks Sumut sebagai daerah yang sangat korup. Dalam hal inilah pesimisme berpemerintahan Sumut muncul dikalangan rakyat.

Berangkat dari apatisme rakyat pada pemerintahan, apakah mereka bisa kita salahkan ketika mereka tidak memberikan suaranya pada 7 Maret 2013 kemarin? Salahkan mereka mendesah dengan ucapan yang sangat sederhana, “siapa pun gubernur nasib kemai seperti ini”. Berangkat dari desahan ucapan inilah banyak warga Sumut menjadi golput. Mereka memilih golput dengan alasan membuang energi untuk memilih. Toh pada akhirnya mereka akan membentuk oligarki lokal di Sumut. Sikap apatisme publik ini bukan tanpa alasan. Sementara yang dibutuhkan oleh rakyat bukanlah hal yang sulit.

Mereka hanya butuh jalan, sarana air minum, harga sembako jangan terlalu tinggi. Permintaan rakyat sangat sederhana. Mereka tidak minta rumah, mobil, atau barang mewah lainnya. Bagaimana pemerintah menyanggupi permintaan rakyat yang sangat sederhana ini tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah. Bahkan konsep anggaran dalam struktur APBD tidak pernah berpihak kepada masyarakat.

Biaya-biaya untuk belanja pegawai lebih besar daripada belanja untuk publik. Ini sungguh sebuah kondisi yang sangat ironis. Bagaimana keberhasilan pembangunan bisa berhasil dengan struktur APBD yang tidak pernah berpihak kepada masyarakat. Munculnya apatisme rakyat pada pemerintahan, termasuk golput dalam setiap pemilu secara psikologis bisa kita maklumi.

Ketika golput menjadi pemenang pada pilgubsu 2013 ini merupakan sebuah simbol kekecewaan masyarakat pada pemerintah sudah sampai pada titik nadir. Apakah kehadiran golput menjadi momok yang menakutkan pada kita semua? Sebelum tiba sampai pada sebuah konklusi bahwa golput itu merugikan pada perkembangan demokrasi, memahami mengapa golput menjadi pemenang jauh lebih penting daripada menyalahkan golput tersebut.

Mengapa golput bisa menang dalam pilgubsu 2013 merupakan bentuk golput berkonstitusi. Dasar hukum golput sangatlah jelas, gagalnya pemerintah Sumatera Utara menjadi pemerintahan yang baik, pemerintahan merakyat, pemerintahan yang melayani merupakan penyebab munculnya golput menjadi pemenang pada pilgubsu 2013. Golput muncul sebagai fenomena ketika rakyat sudah apatis dan muak dengan kondisi pemerintahan yang tidak pernah berpihak kepada masyarakat. Jelaslah bahwa golput berkonstitusi merupakan fakta kegagalan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan yang berpihak atau berbasis rakyat.

Penutup

Mengantisipasi golput menjadi pemenang pada pemilu 2024 harus dilakukan. Sosialisasi manfaat pemilu dan fungsi pemilu harus dilakukan dengan baik. Kasus di Sumatera Utara misalnya bisa menjadis ebuah contoh. Orientasi politik yang selama ini hanya di level elit saatnya diganti dengan program yang bisa meningkatkan kualitas hidup warga negara. Jika pelayanan publik makin bagus, percepatan pembangunan bisa bermanfaat untuk rakyat maka warga negara akan sangat menyadari betapa pentingnya pemilu itu untuk memilih wakil rakyat dan pemerintahan karena mereka sesungguhnya adalah pelayan yang sangat baik. Jika tidak, rakyat akan melihat bahwa pemilu itu hanya pepesan kosong yang tidak punya manfaat bagi warga negara.

Daftar Pustaka

- Ali, A. M. D., & Yusof, H. (2011). *Quality and qualitative studies: The case of validity, reliability, and generalizability. Issues in Social and Environmental Accounting*, 5(1/2), 25-26
- Basri, H. (2014). *Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda*. *Journal of US-China Public Administration*, October 2014, Vol.11, No.10, 831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003
- Chua, W.F. (1986). *Radical Developments in Accounting Thought. The Accounting Review*, Vol. 61, No. 4 (Oct., 1986), pp. 601-632.
- Evans, Kevin Raymond, *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, PT Arise Consultancies, Jakarta, 2003.
- Feith, Herbert, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1999.
- Haris, Syamsuddin (Editor), *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Yayasan Obor Indonesia – PPW LIPI, Jakarta, 1998.
- Siagian, Nalom (2021) *Statistika Dasar Dan Konseptualiasasi Aplikasi* ,CV.Kultura Digital Media, Surakarta
- Nalom Siagian, *Implikasi Pelaksanaan Reses Anggota DPRD terhadap Daerah Pemilihan di Kabupaten Nias Selatan*, JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (2614-8854) Volume 5, Nomor 1, Januari 2022 (73-87)